

Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Kuba

Studi Kasus: Era Presiden Barack Obama Tahun 2014-2017

Karina Aisyah Setianingsih¹
Andrea Abdul Rahman Azzqy²

Abstract

This study aims to analyze the rational choice of the United States in normalizing diplomatic relations with Cuba. In analyzing it the author uses Rational Choice theory, National Interest theory, and the concept of Foreign Policy. This type of research is qualitative research. The results of this study show that in the normalization of diplomatic relations with Cuba, the United States does not merely perform the normalization but a rational choice which is the interests of the United States that must be achieved in normalizing its diplomatic relations with Cuba in the era of Barack Obama's administration. It can also create relations between the United States and Cuba towards the better.

Keywords: *foreign politics, national interest, rational choice, Cuba, United States*

Pendahuluan

Amerika Serikat adalah negara adidaya yang juga disebut sebagai negara *super power* dengan sistem pemerintahan Republik Federal memiliki kekuatan militer, ekonomi, teknologi serta politik yang cukup besar. Pasca Perang Dunia II Amerika Serikat memperluas pengaruhnya pada bidang industri dan menjadi pusat teknologi dunia. Terutama setelah runtuhnya Uni Soviet sebagai Blok Timur, menjadikan Amerika Serikat yang merupakan Blok Barat menjadi satu-satunya negara adidaya dunia. Pada aspek ekonomi, Amerika Serikat bertanggung jawab dalam menciptakan stabilitas kondisi perekonomian dunia dengan memimpin perekonomian menggunakan nilai-nilai liberal yang sesuai dengan konsep ideologi Amerika Serikat. Hal tersebut menjadikan Amerika Serikat sebagai negara yang cukup mendapat perhatian dari negara-negara di dunia untuk setiap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan Amerika Serikat. Adanya pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat juga menarik perhatian negara-negara di dunia seperti pergantian kepemimpinan George W. Bush dengan pemerintahan Barack Obama yang merupakan kali pertama Amerika Serikat dipimpin oleh ras kulit hitam yang berasal dari partai Demokrat. Kebijakan pada pemerintahan George W Bush

¹Mahasiswi S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budiluhur. Email: karinaisyahs@yahoo.com

²Dosen Tetap Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Budiluhur.

mengedepankan adanya kekerasan dan militer namun Barack Obama memperlihatkan adanya diplomasi dalam pemerintahannya (Muna, 2009:86-87). Barack Obama terpilih sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat pada 2009. Tiga bulan setelah Obama resmi menjabat beliau menyatakan keseriusannya untuk memulai babak baru dalam kemitraan Amerika Serikat dengan negara-negara kawasan Amerika Latin terutama dalam keseriusannya mengawali hubungan yang baru dengan Kuba mengingat selama beberapa dekade Amerika Serikat dan Kuba tidak menikmati hubungan diplomatiknya.

Hubungan Amerika Serikat dengan Kuba telah terjalin sejak abad ke-19 saat Amerika Serikat menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan negara-negara yang berada di kawasan Amerika Latin. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan adanya kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh Presiden Monroe yang menjelaskan adanya pola *defensive* Amerika dengan menyatakan bahwa negara lain terutama bangsa Eropa tidak boleh ikut campur mengenai urusan-urusan dalam negeri kawasan Amerika yang disebut dengan Doktrin Monroe (T. Gilderhus, 2006:1). Namun, pola *defensive* yang dirumuskan oleh Amerika Serikat dalam doktrin tersebut justru diimplementasikan terlalu jauh sehingga muncul tindakan intervensi terhadap negara-negara di kawasan Amerika Latin. Salah satu seperti saat Amerika Serikat ikut campur dalam militer Kuba guna meruntuhkan kolonialisasi Spanyol di tanah Kuba (Siboro, 2012:35). Meskipun begitu, Amerika Serikat berhasil mengambil alih Kuba dari Spanyol dan Kuba mendapatkan kemerdekaannya pada 20 Mei 1902. danya intervensi dari Amerika Serikat pada saat merebut kekuasaan dari Spanyol mengharuskan Kuba mengabdikan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat pasca kemerdekaan Kuba serta memperkuat dominasi politik nya di Kuba, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya *Platt Amendment* yang disepakati oleh kedua negara. *Platt Amendment* berisikan kesepakatan yang disetujui Kuba untuk Amerika Serikat secara tidak langsung mengintervensi Kuba guna mempertahankan dan melindungi kemerdekaan Kuba serta menciptakan pemerintahan yang mampu dengan baik melindungi kehidupan, hak milik, dan kebebasan setiap individu yang berada di tanah Kuba yang merupakan tanahnya sendiri.

Setelah merasakanti ketidak bebasan dari masyarakat Kuba itu sendiri, memicu adanya pergerakan-pergerakan perlawanan dari masyarakat Kuba, seperti adanya Revolusi Kuba yang berhasil dilakukan oleh Fidel Castro pada 1959. Hal tersebut memicu adanya ketegangan di dalam hubungan diplomatik diantara Amerika Serikat dan Kuba. Ditambah dengan Kuba yang menunjukkan kedekatannya dengan Uni Soviet dan terlihat bahwa dalam menjalankan pemerintahannya Castro menganut paham komunis dan sedangkan Amerika Serikat merupakan negara yang menganut paham demokrasi sehingga dengan adanya perbedaan paham tersebut membuat hubungan diantara keduanya cukup mengalami ketegangan dan Amerika Serikat merasa ingin mengakhiri hubungan diantara kedua negara tersebut. Dari berbagai kebijakan Castro yang cenderung merugikan Amerika Serikat, maka dikeluarkan sanksi embargo untuk perekonomian Kuba sebagai respon dari kebijakan tersebut. Sanksi embargo yang diberikan Amerika Serikat kepada Kuba secara langsung menghentikan berbagai kegiatan perdagangan Kuba terutama dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat serta pemberhentian pengiriman bantuan apapun dari Amerika Serikat ke Kuba sehingga terjadinya pengisolasian kepada Kuba. Masyarakat yang berada di Amerika Serikat juga mendapatkan pembatasan dalam pengiriman uang ke wilayah-wilayah di Kuba dan menghentikan kerjasama antara Amerika Serikat dan Kuba di bidang pariwisata, hal-hal tersebut juga merupakan wujud dari sanksi embargo ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat untuk Kuba (Tobing, 2014:52). Dengan kondisi hubungan kedua negara yang

semakin memanas maka tepat pada 3 Januari 1961, Amerika Serikat memutuskan untuk menutup kedutaan besarnya di Havana dan melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Kuba.

Selama lebih dari 50 tahun hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba membeku, baru pada saat Barack Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat menunjukkan titik terang dalam hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Gagasan untuk menemukan titik terang pada hubungan diplomatik kedua negara tersebut telah dilakukan mulai Desember 2014 dengan menyatakan bahwa akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik yang sejak 1961 sudah terputus. Obama menyatakan bahwa diantara Amerika Serikat dan Kuba sangat memerlukan upaya perubahan kedepan dengan arah yang lebih baik karena selama ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Amerika Serikat ke Kuba menurutnya telah usang bahkan ketinggalan zaman. Dengan adanya kesepakatan untuk mengawali normalisasi maka hubungan diplomatik diantara Amerika Serikat dan Kuba akhirnya mulai mencair.

Amerika Serikat dan Kuba mengalami pasang surut hubungan diplomatik dalam jangka waktu yang cukup lama. Memanas nya hubungan diplomatik diantara kedua negara diawali dari perlawanan yang dilakukan Kuba saat menyadari bahwa Amerika Serikat mendominasi politik Kuba meskipun Kuba sudah mendapat kemerdekaannya. Kehidupan masyarakat Kuba dibawah sanksi embargo ekonomi Amerika Serikat cukup menarik perhatian dunia Internasional. Namun, titik terang diantara hubungan kedua negara mulai terlihat saat Barrack Obama terpilih sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat. Dimulai dari era Obama, kesepakatan normalisasi diantara Amerika Serikat dan Kuba dapat dicapai. Dengan lahirnya sebuah normalisasi hubungan diplomatik diantara kedua negara, tentu adapula kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi jalannya normalisasi tersebut. Amerika Serikat dalam membuat kebijakan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba tentu tidak semata-mata langsung melahirkan kebijakan tersebut, melainkan adapula pertimbangan yang menjadikan kebijakan tersebut harus muncul dalam normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Kuba era presiden Barack Obama. Dari pemaparan masalah tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan penelitian: Mengapa Amerika Serikat dibawah pemerintahan Barack Obama mewujudkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba?

Pembahasan

Teori Pilihan Rasional

Ketika sebuah negara memutuskan untuk bekerjasama atau menolak sebuah kerjasama terdapat alasan serta tujuan dari negara tersebut. Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, negara akan memanfaatkan kebijakan luar negeri sebagai instrumennya. Negara merupakan aktor rasional dalam memutuskan pilihan mana yang terbaik bagi negaranya berdasarkan dari beberapa pilihan yang telah ada. Teori pilihan rasional bersifat individu yang dipandang sebagai produk kolektif atas pilihan individu. Waltz menjelaskan ketika aktor memiliki kepentingan maka ia akan memilih sebuah pilihan yang dianggap dapat memaksimalkan aktor tersebut dalam pencapaian kepentingannya. Teori pilihan rasional juga menjelaskan kemungkinan kendala yang akan didapat oleh aktor dengan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa pilihan, contohnya jika pilihan A merupakan pilihan yang lebih penting dibandingkan pilihan B dan C maka yang dipilih adalah pilihan A. Jadi, sebuah aktor dalam menentukan keputusan apa yang ingin diambil demi tercapai kepentingan-kepentingannya maka digunakan teori pilihan rasional agar keputusan yang diambil merupakan sebuah keputusan terbaik (Walt, 1999: 10).

Teori Kepentingan Nasional

Dalam menjelaskan dan memahami perilaku internasional serta dasar perilaku luar negeri suatu negara maka diperlukan adanya konsep kepentingan nasional. Dalam buku Anak Agung Perwita dan Yani mendefinisikan kepentingan nasional merupakan "Upaya sebuah negara untuk mengejar power, dimana power merupakan sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian dapat melalui teknik pemaksaan ataupun kerjasama. Oleh karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai saran sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional" (Perwita dan Yani, 2006: 39). Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan fundamental dan faktor akhir yang menentukan arah para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.

Kepentingan Nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara berkaitan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif tetap dan sama diantara semua negara di dunia yaitu meliputi keamanan dan kesejahteraan. Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Perwita dan Yani, dapat disimpulkan bahwa normalisasi hubungan diplomatik diupayakan oleh Amerika Serikat untuk menjaga powernya sebagai negara adidaya sekaligus untuk mempertahankan kehidupan negara tersebut dalam tatanan internasional maka Amerika Serikat memiliki kepentingan-kepentingan yang merupakan alasan ataupun pilihan masuk akal dalam melakukan normalisasi untuk mencapai cita-citanya dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan dunia.

Konsep Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan upaya yang dilakukan melalui seluruh sikap dan aktivitas sebuah negara dalam mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Rosenau mengatakan bahwa politik luar negeri ditujukan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan sebuah negara (Rosenau, 1976:27). Oleh karena itu negara akan selalu melakukan penyesuaian dengan lingkungan eksternalnya dalam pencapaian kepentingan nasional negara tersebut. Politik luar negeri juga memiliki tujuan yaitu manifestasi dari kepentingan nasional sebuah negara. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh masa lalu dan keinginan yang akan dicapai di masa mendatang. Menurut Rosenau, tujuan dari politik luar negeri juga dibedakan menjadi 3 kategori yaitu, tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Pada dasarnya, tujuan jangka panjang dari politik luar negeri seluruh negara-negara di dunia yaitu untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.

Jadi, tujuan politik luar negeri disebut juga sebagai citra terkait dengan keadaan atau kondisi masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui perumus kebijakan dapat mencapai tujuan tersebut secara maksimal. Menurut konsep politik luar negeri yang dipaparkan Rosenau, maka dapat disimpulkan bahwa dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba, Amerika Serikat memiliki politik luar negeri dibawah kepemimpinan Barack Obama yang dapat mendukung pencapaian kepentingan nasional dalam normalisasi tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.

Hampir seluruh negara memiliki politik luar negeri yang mengarah pada pencapaian kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri pada dasarnya tidak memiliki sifat yang tetap namun harus memberikan respon dan perumusan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan nasional sebuah negara yang akan memberikan peluang dalam hubungan antar negara. Amerika Serikat mencerminkan hal tersebut karena dapat dilihat dari serangkaian kebijakan luar negerinya yang berkaitan dengan persaingan ekonomi, memperkuat pertahanan, upayanya dalam mewujudkan perdamaian dan kebebasan dunia, serta memperluas ideologi demokrasi dalam tatanan internasional.

Dalam konteks politik luar negeri, Amerika Serikat dalam menjalin hubungan maupun kerjasama dengan negara-negara di dunia dengan berpegang kepada 4 kerangka kerja yang bersifat utama guna tercapainya kepentingan-kepentingan nasional Amerika Serikat. Kerangka kerja tersebut yaitu: (Ikkenberry, 2007).

1. *Power*

Hal yang harus dimiliki dalam perumusan dan pertimbangan kebijakan-kebijakan oleh Amerika Serikat. Adanya sebuah *power* pada setiap negara tentu dapat mengatur segala hal agar sesuai dengan kepentingan negara tersebut. Amerika Serikat tidak dapat mencapai kepentingannya apabila tidak memiliki *power* nya dalam tatanan internasional.

2. *Peace*

Amerika Serikat sebagai negara *super power* telah menempatkan posisinya sebagai negara yang berhak melakukan apa saja demi mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian itu sendiri diartikan sebagai sebuah keadaan dimana tidak ada perang. Maka, Amerika Serikat memastikan bahwa seluruh negara di dunia telah dalam kondisi yang aman dan tidak ada perang. Lalu, ketika ada yang mengancam kepentingannya dalam menjaga ketertiban dunia Amerika Serikat akan menggunakan *power* nya untuk mempertahankan pencapaian kepentingannya.

3. *Prosperity*

Kemakmuran menjadi salah satu tujuan penting dalam kepentingan nasional setiap negara. Dalam hal ini, Amerika Serikat menunjukkan politik luar negerinya guna mendapatkan keuntungan ekonomi.

4. *Principles*

Amerika Serikat akan menyebarkan dan menanamkan prinsip-prinsipnya pada seluruh negara-negara di dunia. Prinsip yang dimaksudkan adalah nilai-nilai yang dianut Amerika Serikat. Nilai-nilai tersebut adalah demokrasi yang selalu dipromosikan oleh Amerika Serikat kepada seluruh negara di dunia. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat guna mencapai kepentingannya di wilayah-wilayah yang telah ditentukan.

Meskipun setiap adanya pergantian presiden di Amerika Serikat memiliki kebijakan yang berbeda-beda namun kebijakan luar negeri yang ditetapkan tidak pernah melupakan empat kerangka kerja tersebut secara tidak langsung karena keempat poin diatas merupakan pedoman sekaligus arah bagi para pemimpin Amerika Serikat agar tidak keluar dari jalan dan cita-cita Amerika Serikat dalam menjalankan politik luar negerinya.

Presiden Barack menjabat sebagai presiden Amerika Serikat selama 2 periode dimana pada 2012 Obama terpilih kembali sebagai presiden Amerika Serikat yang akan menjalankan pemerintahannya hingga tahun 2017 (The White House, 2018). Dalam pemerintahan Barack Obama, Amerika Serikat mengalami perubahan sifat kepemimpinan yang cukup jelas dengan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh George W. Bush

yang memiliki sifat yang terkesan konvensional dalam menghadapi konflik. Amerika Serikat mengupayakan adanya perubahan fundamental yaitu dalam strategi kemiliteran yang diterapkan secara global. Hal tersebut juga dipengaruhi adanya kebangkitan China dan India yang akan mempengaruhi pergerakan kekuasaan di Asia hingga seluruh dunia. Seperti yang telah ditegaskan oleh administrasi Obama bahwa Amerika Serikat akan mengubah sikapnya agar lebih efektif dan efisien maka pada awal pemerintahannya, Obama mengkaji ulang terkait sikap militer Amerika Serikat secara global di masa yang akan datang. Politik luar negeri pemerintahan Barack Obama juga menyatakan betapa pentingnya bagi Amerika Serikat untuk melakukan diskusi atau dialog selain dengan negara sekutu atau negara sahabat tetapi juga dengan musuh-musuh Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat pada pemerintahan Barack Obama sudah tidak melarang adanya pembicaraan dengan orang-orang yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat dan tidak hanya dengan negara-negara sekutu atau negara sahabat. Politik luar negeri pada masa pemerintahan Obama terlihat jelas terdapat diplomasi *smart power*. Adanya diplomasi *smart power* merupakan hal penting yang dilakukan Obama dalam politik luar negerinya. *Smart power* merupakan gabungan dari *hard power* dan *soft power* demi mencapai tujuan-tujuannya memimpin Amerika Serikat. Selain adanya pernyataan penggunaan *smart power* adapula pidato dari Obama yang diumumkan pertama kali pada sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa dimana Obama menegaskan bahwa dunia harus melakukan pergerakan ke era yang baru. Obama dalam memimpin Amerika Serikat diharapkan dapat menciptakan perdamaian dunia dimana Obama juga menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dapat membawa kemajuan bagi Amerika Serikat serta negara-negara lain di dunia. Dari upaya inilah dapat dilihat bahwa Amerika Serikat berupaya untuk merangkul kembali negara-negara yang hubungannya kurang harmonis dengan Amerika Serikat untuk menjadikan mereka mitra strategis yang berdampak berubahnya cara pandang dunia internasional terhadap Amerika Serikat kala itu.

Adapun pada masa pemerintahan Obama tepatnya pada pertemuan dengan beberapa perwakilan negara yang diadakan di Kairo, ia mengungkapkan langkah-langkah yang ditempuh olehnya dalam pemerintahan adalah seperti (P. Lagon, 2011):

1. Mengutamakan berdiskusi guna mencapai suatu kepentingan dan kata sepakat
2. Menghormati dan menghargai kerjasama-kerjasama yang terjalin secara bilateral maupun multilateral
3. Mensosialisasikan kepentingan Amerika Serikat dengan cara yang lebih bersahabat (*soft power*)

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Obama dalam pemerintahannya tersebut sangat mempengaruhi hubungan diplomatiknya dengan Kuba yang telah lebih dari 50 tahun mengalami kebekuan tepatnya setelah peristiwa Revolusi Kuba pada 1959. Dibawah pemerintahan Obama, Kuba berpotensi kembali menjadi negara sahabat Amerika Serikat. Dibawah pemerintahan Obama, Amerika Serikat mengalami perubahan pada orientasi politiknya serta citra arogan yang dimiliki Amerika Serikat mulai menghilang pada masa pemerintahannya dan dunia internasional percaya bahwa Obama akan menjadi seorang pemimpin yang progresif bagi Amerika Serikat (T.D. Putro, 2012: 1). Dalam politik luar negeri pemerintahan Barack Obama terlihat jelas bahwa ia menginginkan adanya pembangunan aliansi yang efektif dan relevan dengan adanya kerjasama yang tetap. Selain itu, Obama juga terlihat mengganti arah kebijakan Amerika Serikat kepada isu multilateralisme dimana pada sebelum pemerintahannya lebih

mengedepankan kekuatan militer sehingga pada hal ini kekuatan militer akan dimanfaatkan dalam mempertahankan perdamaian di dunia.

Dalam normalisasi tersebut Amerika Serikat memiliki kepentingan-kepentingan nasional yang akan dicapai demi keuntungan signifikan untuk Amerika Serikat sendiri serta dengan adanya arah politik luar negeri presiden Barack Obama yang cenderung menggunakan "*smart power*" nya semakin membawa dukungan penuh untuk merealisasikan normalisasi tersebut. Amerika Serikat merupakan negara adidaya terbesar dunia dibawah kepemimpinan Barack Obama memiliki kebijakan strategis terkait dengan geopolitik dan geostrategisnya di kawasan, dalam hal ini Amerika Serikat melihat keberadaan Kuba yang dapat mendukung adanya kebijakan srategis tersebut sehingga normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba merupakan geostrategis Amerika Serikat.

Kepentingan Ekonomi

Kepentingan tersebut merupakan hal mendasar bagi suatu negara yang akan menjadi tolak ukur baik atau buruknya kondisi kehidupan masyarakat didalam negara tersebut. Selain itu juga setiap negara tentu tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan ataupun bekerjasama dengan negara lain. Begitupula Amerika Serikat, meskipun merupakan sebuah negara adidaya terbesar dunia Amerika Serikat tetap membutuhkan bantuan dari negara lain dalam mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki kepentingan ekonominya sendiri dalam melakukan normalisasi karena tentu sebagai sebuah negara akan mengutamakan adanya keuntungan dibanding kerugian dalam menentukan sebuah kebijakan.

Terdapat 3 faktor yang juga merupakan pertimbangan dari Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba di bidang ekonomi, yaitu (Ritter, 2016):

1. Dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik, hubungan perekonomian antara Amerika Serikat dan Kuba akan mengalami perkembangan kearah yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan adanya ekspansi ekspor yang dibutuhkan Kuba dalam menjalankan normalisasi yang tentu akan menghasilkan peningkatan jumlah impor dari setiap negara yang menjadikan Kuba sebagai mitra dagangnya.
2. Dibawah kepemimpinan Raul Castro, kebijakan Kuba terkait perdagangan, investasi asing dan pariwisata tidak akan mengalami perubahan yang berarti bagi Amerika Serikat sehingga tidak berpengaruh bagi jalannya normalisasi hubungan diplomatik kedua negara.
3. Perdagangan dan investasi Amerika Serika di Kuba akan mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dan Kuba dimana terdapat perluasan terhadap perizinan ekspor di Kuba serta adanya kerjasama yang bersifat kuat dan terbuka antara Amerika Serikat dan Kuba sehingga akan berpeluang besar dalam mendapatkan keuntungan.

Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dalam normalisasi mengarah pada perluasan investasinya di Kuba karena dengan adanya normalisasi memberi peluang besar bagi terbukanya pasar ekonomi Kuba untuk perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat dalam mencari keuntungan.

Pilihan Rasional Kebijakan Amerika Serikat dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Kuba

Kepentingan Politik

Kepentingan politik merupakan hal yang dapat disebut sebagai hal yang relevan untuk memunculkan adanya demokrasi pada identitas politik suatu negara dan juga terkait dengan eksistensinya. Kepentingan politik juga dapat disebut sebagai kekuatan suatu negara dalam eksplorasi. Mengingat kepada semakin berkembangnya hegemoni Tiongkok pada tatanan internasional juga membuat Amerika Serikat semakin waspada dan melakukan segala cara untuk mengembalikan citra Amerika Serikat di kawasan regional Amerika Latin. Tiongkok merupakan negara komunis dimana sesuai dengan sebagian besar ideologi negara-negara di kawasan Amerika Latin akan semakin mudah memperluas hegemoninya. Adanya tekanan-tekanan regional dan domestik yang diperoleh Amerika Serikat juga merupakan faktor-faktor yang membuat Obama mengupayakan kembali adanya perluasan hegemoni Amerika Serikat dengan memperbaiki citranya.

Tekanan regional yang didapat tentu dari kawasan Amerika Latin yang berlangsung ketika adanya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara Amerika yang ke VII. Dimana pada KTT tersebut para pemimpin negara-negara Amerika Latin mendominasi adanya pemboikotan KTT selama Kuba masih mendapat larangan untuk mengikuti KTT kawasan Amerika, sehingga Obama yang memiliki arah kebijakan yang lebih mengutamakan berdiskusi atau negosiasi melakukan negosiasi dengan Kuba agar ikutserta kedalam KTT (Marior, 2016). Selain tekanan dari negara-negara kawasan Amerika Latin, Amerika Serikat juga mendapat tekanan dari lingkungan domestiknya seperti dari masyarakat Amerika Serikat yang menyetujui adanya normalisasi karena mereka percaya bahwa normalisasi akan memunculkan dampak baik bagi kedua negara terutama untuk warga Amerika Serikat yang memiliki anggota keluarga di Kuba. Jadi, hal tersebut yang semakin memperkuat Obama dalam meyakinkan diri bahwa Amerika Serikat dapat melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba.

Tekanan-tekanan yang didapat Amerika Serikat telah menjadi pertimbangan bagi negara tersebut untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba. Adanya tekanan tersebut mempengaruhi adanya kepentingan Amerika Serikat yaitu dalam memperbaiki citranya dalam tatanan internasional terutama kawasan Amerika Latin guna menahan dominasi atau hegemoni Tiongkok. Mengingat pesatnya perkembangan Tiongkok di segala bidang pada saat ini yang berupaya menyaingi Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia. Pada pemerintahan Barack Obama melalui politik luar negerinya ia dengan sigap mengambil tindakan diplomasi untuk menanggapi tekanan-tekanan tersebut.

Kepentingan Keamanan

Dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang diutarakan demi keamanan negaranya serta warganya. Kepentingan keamanan yang Amerika Serikat ingin dicapai pada normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba yaitu adanya meningkatkan keamanan untuk warga Amerika Serikat yang berada di Kuba ataupun melakukan perjalanan ke Kuba, keamanan dalam imigrasi ke Amerika Serikat, hingga pada kepentingan Amerika Serikat dalam mengurangi pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kuba (The White House, 2016). Sebagai sebuah negara, menjaga keamanan setiap warga Amerika Serikat didalam maupun luar negeri sudah menjadi sebuah kewajiban. Dibawah pemerintahan Barack Obama, mencapai kepentingan keamanan merupakan salah satu alasan utama bagi Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba.

Dengan adanya normalisasi hubungan diplomatik sangat berpengaruh bagi kepentingan Amerika Serikat terhadap keamanan warganya. Maka dari itu, saat normalisasi dibuka kedutaan besar Amerika Serikat di Havana yang merupakan ibukota Kuba. Pembukaan kedutaan besar tersebut telah menggantikan *United States Interest Section* yang telah melaksanakan tugas perwakilan Amerika Serikat di Kuba saat hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Keberadaan USIS tentu tidak dapat semaksimal keberadaan kedutaan besar. Bagaimanapun juga kedutaan besar merupakan hal terpenting dalam kelangsungan hubungan sebuah negara dengan negara lain. Karena adanya kedutaan besar akan mempertegas adanya perwakilan resmi sebuah negara. Meskipun Amerika Serikat akan kehilangan salah satu lembaga nya yaitu USIS namun, kepentingan Amerika Serikat dalam meningkatkan keamanan warganya di Kuba akan lebih mudah tercapai. Hal tersebut menjadi sebuah pertimbangan bagi Obama dalam mengupayakan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba guna memberikan rasa aman bagi seluruh warga Amerika Serikat.

Selain itu, terciptanya sebuah alur migrasi yang baik dan teratur juga merupakan kepentingan keamanan Amerika Serikat. Dalam mencapai kepentingan tersebut presiden Barack Obama menghapuskan kebijakannya yang cenderung mengistimewakan imigran Kuba yang telah dipaparkan pada bab III yaitu kebijakan *Wet Foot Dry Foot*. Apabila kebijakan tersebut dihapuskan maka akan menciptakan keamanan bagi wilayah Amerika Serikat dari para imigran gelap serta akan timbul proses imigrasi yang baik dan teratur sesuai dengan peraturan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama. Meskipun dampak dari penghapusan kebijakan tersebut yaitu berkurangnya bahkan hilangnya tenaga profesional Kuba yang sebelumnya banyak melarikan diri ke Amerika Serikat untuk mendapat status sebagai warga Amerika Serikat agar mendapat kehidupan yang lebih terjamin. Namun kebijakan tersebut tentu mendapat kecaman dari imigran yang berasal dari negara selain Kuba karena merasa tidak adanya keadilan perlakuan terhadap imigran asal negara selain Kuba dan membuat kondisi imigrasi di Amerika Serikat menjadi tidak kondusif.

Kesimpulan

Selama lebih dari 50 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat mengalami kebekuan yang terjadi pasca adanya revolusi Kuba yang digagas oleh Castro untuk menggulingkan pemerintahan pro-Amerika Serikat di Kuba yaitu Batista. Seiring dengan berkembangnya zaman sudah saatnya kedua negara melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Tepat pada saat terpilihnya Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat pada 2009. Amerika Serikat dibawah pemerintahan Obama memiliki orientasi politik kearah yang lebih efektif serta mengedepankan soft power dalam menjalin kedekatannya dengan negara-negara lain terutama negara sekitar di kawasan. Pada masa kampanyenya Obama berjanji bahwa ia akan mengupayakan perbaikan hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba karena kebijakan Amerika Serikat yang mengisolasi Kuba menurutnya sudah cukup usang dan tidak membawa perubahan kearah yang lebih baik. Meskipun pemerintahan Obama telah berjalan sejak 2009, namun kesepakatan normalisasi diantara kedua negara baru dapat diresmikan pada periode kedua pemerintahan Obama yaitu pada 2014.

Terdapat kepentingan-kepentingan yang ingin diwujudkan kedua negara dalam proses normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Seperti kepentingan Amerika Serikat yang memperluas jangkauan pasar ekonomi Amerika Serikat, meningkatkan hubungan antar manusia, serta menjunjung kehormatan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang akan ditanamkan di Kuba. Selain Amerika Serikat, Kuba juga memiliki

kepentingannya sendiri dalam normalisasi tersebut seperti ingin embargo ekonomi yang diberlakukan untuk Kuba dihapuskan, dikembalikannya wilayah Guantanamo, penghormatan atas kedaulatan Kuba sebagai sebuah negara yang telah merdeka, serta adanya kompensasi ekonomi untuk Kuba terkait dengan kerugian yang dialami selama masa-masa sebelum normalisasi hubungan diplomatik diupayakan. Kepentingan yang dinyatakan oleh kedua negara tidak akan tercapai tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung. Selain itu juga dalam proses normalisasi, Amerika Serikat dan Kuba juga menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

Dalam skripsi ini, penulis memfokuskan kepada alasan mengapa Amerika Serikat melakukan normalisasi tersebut yang didapatkan melalui adanya pertimbangan-pertimbangan secara rasional atau masuk akal. Dimulai dari adanya kepentingan ekonomi yang merupakan hal utama dalam perkembangan pembangunan sebuah negara termasuk Amerika Serikat sebagai negara *super power* yang dikenal memiliki pertumbuhan perekonomian yang pesat. Maka dalam mencapai kepentingan tersebut Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan pertimbangan yang memperhitungkan *cost* ataupun *benefitnya*. Selain itu adapula kepentingan politik Amerika Serikat dibawah pemerintahan Barack Obama yang cenderung menggunakan *smart power* dalam menjalani pemerintahannya. Dimana kepentingan politik Barack Obama juga merupakan alasan Amerika Serikat untuk normalisasi hubungan diplomatik dengan Kuba, karena banyaknya tekanan-tekanan yang didapatkan dari regional maupun domestik sehingga Obama berupaya untuk mengembalikan citra Amerika Serikat guna kelancaran hubungannya dengan negara-negara lain terutama kawasan Amerika Latin. Pada normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba, Amerika Serikat juga menjunjung tinggi keamanan internasional yang diawali dengan keamanan nasional seperti adanya kepentingan keamanan Amerika Serikat dalam normalisasi tersebut. Kepentingan dalam keamanannya adalah peningkatan perlindungan terhadap warga Amerika Serikat yang melakukan perjalanan ke Kuba atau bahkan bertempat tinggal di Kuba. Karena sudah menjadi kewajiban sebuah negara untuk melindungi keamanan warganya apalagi Amerika Serikat merupakan negara adidaya terbesar di dunia.

Kepentingan-kepentingan Amerika Serikat yang telah dipaparkan merupakan hasil dari pilihan-pilihan rasional Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Kuba. Karena dengan adanya normalisasi, Amerika Serikat dapat mencapai bahkan meningkatkan powernya dalam tatanan internasional, hal itu juga dicapai dengan adanya arah politik luar negeri Barack Obama sebagai presiden Amerika Serikat yang memiliki *smart power* dalam menjalankan pemerintahannya. Normalisasi hubungan diplomatik juga akan membawa hubungan antar kedua negara kearah yang lebih positif setelah beberapa dekade mengalami dinamika yang cukup serius. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pilihan rasional Amerika Serikat dalam normalisasi hubungan diplomatik yaitu adanya kepentingan-kepentingan Amerika Serikat yang juga memiliki pertimbangannya masing-masing dan Amerika Serikat memutuskan bahwa hal-hal tersebut adalah kepentingan yang harus dicapai Amerika Serikat sebagai negara adidaya dunia. Dan Amerika Serikat yang melihat Kuba sebagai geostrategis dalam kepentingannya di tatanan internasional dibawah pemerintahan Barack Obama.

Referensi

- Gilderhus, Mark T. (2006). *The Monroe Doctrine: Meanings and Implication*, Texas : Christian University.
- Ikenberry, John G. (2007). *"American Foreign Policy Theoretical Essay"*. New York: W.W. Norton & Company Inc.
- Lagon, Mark P. (2011). *"The Value of Values: Soft Power Under Obama"*, Journal : World Affairs.
- Marior, Deschamps. (2016). "5 Alasan Mengapa Obama Merubah Kebijakannya Terhadap Kuba", <http://www.berdikarionline.com/5-alasan-mengapa-obama-mengubah-kebijakan-as-terhadap-kuba/> diakses pada 27 Januari 2018.
- Putro, Ganesha T.D. (2012). "Representasi Presiden Terpilih Barack Obama: (Analisis Semiotika Roland Barthes Sampul Depan&Belakang Majalah TIME Special Commemorative Edition)", Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.
- Ritter, Arch. (2016). "Canada-Cuba Economic Relation: An Update", <https://thecubaneconomy.com/articles/tag/foreign-investment/> diakses pada 26 Januari 2016
- Siboro, Julius. (2012). *Perkembangan dan Pergolakan Politik di Negara-negara Amerika Latin Sesudah Tahun 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- The White House: President Barack Obama. (2018). "President Barack Obama", <https://obamawhitehouse.archives.gov/administration/president-obama> diakses pada 23 Januari 2018
- The White House President Barack Obama. (2016). "Presidential Policy Directive-United States-Cuba Normalization", <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/14/presidential-policy-directive-united-states-cuba-normalization> diakses pada 28 Januari 2018.
- Tobing, Chastry E.F. (2014). *"Implikasi Politik Akibat Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Pemerintahan Fidel Castro"*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Medan: Universitas Sumatra Utara.